

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2003  
TENTANG KHALWAT/MESUM DI KOTA SUBULUSSALAM  
DALAM MENCEGAH PERGAULAN BEBAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera*

**OLEH**

**JUNAIDI**

**NIM: 23.13.3.013**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**PERAN PARTAI POLITIK ACEH DALAM MEWUJUDKAN  
PERDAMAIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JUNAIDI**

**NIM: 23.13.3.013**

Mengetahui

**PEMBIMBING I**

**Dr. Eldin H. Zainal, M.Ag**

NIP: 19750531 200710 1 001  
002

**PEMBIMBING II**

**Syofiaty Lubis, M.H**

NIP: 19830610 200912 2

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan

Hukum

UIN-SU

**Fatimah, MA**

NIP. 19710320 199703 2

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas. Melalui Qanun ini dimaksudkan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat, melindungi masyarakat dari berbagai kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan serta mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari perbuatan yang mengarah kepada zina. Dalam kenyataannya qanun ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi faktor pendukung penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat di Kota Subulussalam. 2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Subulussalam. 3. Sejauhmana Implementasi penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat dalam mencegah pergaulan bebas di Kota Subulussalam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dan dalam memilih narasumber penelitian menggunakan teknik purposive sampling.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan Qanun tersebut sebenarnya mempunyai pendukung karena adanya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayatul Hisbah dan juga ditemukan adanya penghambat dalam menegakkan Qanun ini diantaranya terkikisnya semangat melaksanakan syariat Islam, kepastian hukum terhadap pelaku khalwat serta Qanun Povinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum belum diterapkan sebagaimana semestinya di Kota Subulussalam. Hal ini dapat terbukti dari 10 (sepuluh) kasus khalwat/mesum yang terjadi diantara tahun 2015 sampai dengan 2017 hanya 2 kasus khalwat/mesum yang sampai ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang, Taufik, Hidayah serta Inayah yang diberikannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan study di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bermahkotaan salam tak lupa penulis hadiahkan ke panguan baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kelauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis mengadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
3. Dalam kesempatan kali ini, Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Siyasah Ibunda Fatimah, Bapak Dhiauddin Tanjung selaku sekretaris jurusan, dan seluruh staf pengawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Ucapan terimakasih juga Penulis berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yakni Dr. Syafruddin Syam, M Ag dan Deasy Yunita Siregar, M.Pd
5. Kepada Ayahanda (Alm) Zainuddin Lembong dan Hj. Siti Amansah yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan moral dan material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.

6. Kemudian ucapan terima kasih kepada ogekk H. Ashal Lembong, dan abanda Amansyah, S.Pd, dan abanda Abdurrahman, SH.I dan kakakku Juriati Lembong, dan Rosmawati, A. Ma, dan Rosmidar dan Ta'ogekku Sarbaini Payung, dan Ta'ajoku Haji Bako dan abang Imam Satori yang telah memberikan nasehat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat materil maupun spritual.
7. Selanjutnya terima kasih kepada Mahkamah Syar'iyah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam yang telah memberikan informasi tentang data maupun pengetahuan yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat saya terutama abanda Nurul El Hakim, SH. I, abanda Mhd. El Anshori, SH.I, Rahmat Fajri Rao, dan Sepupuku Syahrul Ramadhan, Abdul fattah, M. Efendi, Dedy, Dasri, Mehmed Affandi dan lain-lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, kepada mereka penulis haturkan banyak terima kasih yang telah memberikan sport dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT

Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 18 September 2017  
Penulis

Junaidi  
Nim: 23133013

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Hipotesa .....	14
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : TINJAU PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Letak Georafis Kota Subulussalam .....	19
B. Kondisi Demografis.....	20



C. Pengertian Qanun.....	28
D. Tindak Pidana di Bidang Khalwat .....	31
E. Dasar Pelaksanaan Hukuman Cambuk dan Hukum Denda .....	40
F. Proses Cara Pelaksanaan Pidana Cambuk .....	46
<b>BAB III : PERANAN INSTANSI TERKAIT QANUN NO. 14 TAHUN 2003 DALAM MENCEGAH PERGAULAN BEBAS.....</b>	<b>51</b>
A. Dinas Syariat islam .....	51
B. Wilayatul Hisbah .....	53
C. Mahkamah Syar'iyah.....	55
D. Kejaksaan Negeri .....	57
<b>BAB IV : IMPLEMENTASI QANUN NO. 14 TAHUN 2003 DALAM MENCEGAH PERGAULAN BEBAS .....</b>	<b>60</b>
A. Implementasi Qanun Dalam Mencegah Pergaulan Bebas	60
B. Faktor-faktor Pendukung .....	63
C. Faktor-faktor yang tidak mendukung .....	68
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>74</b>

A. Kesimpulan .....	74
---------------------	----

B. Saran .....	75
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA .....	77
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan daerah yang diberlakukan Syaria't Islam oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Pencanangan tersebut bukanlah akhir dari

---

<sup>1</sup> . Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM), h. 25.

pejuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangkamengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam.<sup>2</sup>

Sebagai wujud pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun, diantaranya :

1. Qanun Provinsi NAD (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan Sejenisnya.
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum)

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, ada empat tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syari'at Islam. "Pertama tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis), bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan perintah agama, untuk dapat menjadi muslim yang lebih

---

<sup>2</sup>. *Ibid*, h. 45.

sempurna, yang lebih baik, yang lebih dekat Allah SWT. Kedua tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri. Ketiga tujuan dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Yang Keempat, tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan sosial akan mudah berbentuk dan lebih solid. Agama masyarakat di harapkan akan lebih rajin bekerja, akan lebih hemat dan juga lebih bertanggungjawab.<sup>3</sup>

Melalui qanun-qanun ini masyarakat Aceh berharap Syari'at Islam tersebut dapat diberlakukan kembali seperti pada kejayaan Kerajaan Aceh dahulu terutama pada masa Sultan Iskandar Muda. Salah satu qanun yang dibuat adalah qanun terhadap tindak pidana khalwat/mesum yang bertujuan

---

<sup>3</sup>. Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 81-82

untuk mencegah segala sesuatu kegiatan /perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina (Pasal 2 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum).

Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau mesum di sahkan pada tanggal 15 juli 2003 disebut oleh penjelasannya sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha refresif melalui penjatuhan *‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (qharamah)*. Sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang terjadinya zina

Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Islam dengan tegas melarang perzinahan.<sup>4</sup>

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

*“Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan karena yang ketiga bersama mereka adalah syeitan”*. (Dishohihkan oleh Syeikh Al-Albany dalam *Ash-Shohihah* no. 430

---

<sup>4</sup>. Tjoetra, Afrizal, Modul untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan, (Aceh, ADF Banda Aceh. 2001), h. 23

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو

محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

*“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhawat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.”* (HR. Ahmad)<sup>5</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. QS. Al-Israa' (17) Ayat 32<sup>6</sup>*

Agar qanun ini dapat berlaku efektif, maka di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, maka dilakukan juga pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku oleh Wilayatul Hisbah. Kemudian masyarakat diberikan peranan untuk pencegah terjadinya jarimah khalwat atau mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Peranan masyarakat ini tentu saja tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancamanuqubat cambuk bagi pelaku khalwat atau mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan

---

<sup>5</sup>. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Ihyaut Turots, cetakan ketiga.

<sup>6</sup>. Al-qur'an surah Al-Isra' Ayat 32

sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan *jarimah*. Disamping itu, ‘uqubat cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.

Adapun tujuan lain dari pembuatan qanun ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menegakkan Syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat atau mesum.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>7</sup>

Meskipun penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat telah berlangsung selama Empat Belas Tahun, tetapi dalam kenyataannya di Kota Subulussalam belum pernah sekalipun pelanggaran terhadap qanun ini dihukum sesuai dengan ketentuannya yang ada, sehingga terkesan bahwa

---

<sup>7</sup>. *Ibid.*, h. 84



keberadaan qanun ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat.

Ini dapat dilihat dari hasil wawancara semaksimal langsung yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu tokoh masyarakat di Kota Subulussalam.

Pertama : wawancara langsung dengan tokoh masyarakat bernama H. Muslim SH.I beliau mengatakan bahwa memang betul Qanun tersebut belum terlaksana sebagaimana semestinya sehingga sampai sekarang ini di Kota Subulussalam masih banyak para Muda-Mudi yang berkeliaran di malam hari apalagi di malam minggu khususnya di Kota Subulussalam ini.<sup>8</sup>

Kedua : wawancara langsung dengan tokoh masyarakat bernama Ust. Usbar, beliau mengatakan bahwa yang menegakkan qanun tentang khalwat itu adalah Satuan Pamong Praja (PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) merekalah yang mengurus dan menjalankan qanun tersebut, dan dia juga mengatakan bahwa Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kurangnya kerja lapangan/razia sehingga banyak muda-mudi yang bukan muhrim duduk

---

<sup>8</sup>Muslim SH.I, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Senin 3 Juli 2017.

berduaan di tempat yang gelap yang dapat menimbulkan atau mendatangkan perzinahan.<sup>9</sup>

Ketiga : wawancara langsung dengan tokoh masyarakat bernama Darni, beliau mengatakan bahwa keberadaan qanun tersebut belum dilaksanakan secara efektif dan semestinya sehingga pra muda-mudi a banyak berkeliaran di malam hari dengan yang bukan muhrimnya apalagi di malam minggu khususnya di Kota Subulussalam.<sup>10</sup>

Menurut data awal yang diperoleh dari Kantor Satuan Poilsy Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, pelanggaran terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 pernah terjadi dari tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 10 (sepuluh ) kasus. Tetapi dari 10 (sepuluh) kasus mesum ini hanya 2kasus yang sampai diproses di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang lainnya berakhir ditengah jalan atau tanpa diproses lebih lanjut sehingga bertentangan dengan pasal 14 Qanun itu dalam wilayah Kota Subulussalam selama diberlakukannya Qanun No. 14 tahun 2003 belum satu orang pun pelaku khalwat atau mesum yang dihukum cambuk. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang menghukum

---

<sup>9</sup>. Ust. Usbar, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, selasa 4 Juli 2017

<sup>10</sup>. Darni, Tokoh Masyarakat, wawancara Pribadi, Kamis 6 Juli 2017

terdakwa khalwat atau mesum dengan hukuman pilihan cambuk atau denda, para terhukum lebih memilih membayar denda daripada menjalani hukuman cambuk.<sup>11</sup>

Dari latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti sebenarnya dalam sebuah penelitian ini tentang Implementasi Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat(mesum) di Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Pergaulan bebas.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pendukung penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Subulussalam?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dalam mencegah pergaulan bebas di Kota Subulussalam?

---

<sup>11</sup>. Abdul Malik, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, wawancara pribadi, Kota Subulussalam 06 Juli 2017.

3. Sejauhmana Implementasi penerapan Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum dalam mencegah pergaulan bebas di Kota Subulussalam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah dengan upaya memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan permasalahan penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dalam mencegah Pergaulan bebas di Kota Subulussalam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menyumbangkan pemikiran bagi upaya-upaya penegakan Syariat Islam melalui peraturan perundang-undangan terutama tentang pencegahan terjadinya Khalwat di Kota Subulussalam.
2. Dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pengambil kebijakan dan para pelaksana penegakan Syariat Islam.

#### **E. Kerangka pemikiran**

Agama Islam diturunkan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Fungsi mengatur dalam agama disebut dengan juga syariat.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan daerah Istimewa, syariat Islam sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Bahkan adat Aceh sudah sangat dijiwai oleh agama Islam. Meskipun demikian secara formal belum ada peraturan resmi yang menjadi payung hukum untuk diberlakukannya syariat Islam di Aceh sampai dikeluarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggara keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh.

Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 ditentukan bahwa untuk tindak lanjut penyelenggara Keistimewaan di bidang agama

dilakukan dengan peraturan daerah (qanun). Menindak lanjuti ketentuan di atas dikeluarkanlah berupa qanun, di antaranya Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum. Qanun Khalwat/Mesum meliputi segala kegiatan perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Karena itu setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparaturnya pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan Khalwat.

Qanun ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan Khalwat atau Mesum. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun dengan cara tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan Khalwat atau mesum.

Disamping masyarakat, ada empat lembaga institusi yang paling berperan atau bertanggungjawab terhadap terlaksananya penerapan qanun ini, yaitu :

1. Wilayatul Hisbah, yaitu lembaga yang mengawasi, membina dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan perundang-undangan

bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

2. Penyidik yaitu penyidik umum dan atau penyidik pegawai negeri sipil.
3. Jaksa adalah jaksa Aceh yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan tugas khusus dibidang syariat Islam.
4. Mahkamah Syar'iyah, lembaga yang diberi wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam.

Qanun No. 14 Tahun 2003 juga menentukan pelanggaran terhadap larangan Khalwat atau mesum diancam dengan berupa di cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali, dan paling rendah 3(tiga) kali atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya kepada mereka yang memfasilitasi dan memberikan kemudahan dan perlindungan kepada pelaku Khalwat atau mesum diancam dengan berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua)

bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).<sup>12</sup>

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, bentuk hukuman cambuk bagi pelaku dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukannya,.

## **F. Hipotesis**

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan melihat meraknya pergaulan muda mudi yang bukan muhrim yang terjadi, maka hipotesis penulis adalah bahwa Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum belum berjalan dengan baik dan mempunyai masalah dalam menegakkannya.

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>12</sup> . Himpunan undang-undang. Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur ; Berkaitan pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh ; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), h. 293.



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat dilakukan dengan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif juga dinamakan penelitian hukum normatif.

Menurut Soedjono soekanto sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhan Asshafa, bentuk penelitian normatif ini berupa :

- a. Inventaris hukum positif
- b. Penemuan asas hukum
- c. Penemuan hukum in concreto
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum<sup>13</sup>

Sedangkan Soetandyo Wignjosebroto sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono membagi penelitian Normatif ini menjadi :

- a. Penelitian berupa usaha inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

---

<sup>13</sup>. Burhan Ashafa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 14.

- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dirumusan masalah digunakan pendekatan yuridis normative doctrinal. Sehingga dapat diketahui bagaimana Implementasi Pelaksanaan Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dilapangan serta apa pendukung dan penyebabnya. Namun dalam hal penelitian tetap menggunakan data sekunder.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi yaitu Kota Subulussalam, Aceh.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber yang memberikan data langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong

---

<sup>14</sup>. Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 43.

Praja dan Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syar'iyah.

b. Sumber Skunder

Adapun data sekunder berupa buku-buku dan dokumen, termasuk dalamnya Qanun Provinsi Aceh No.14 tahun 2003 tentang Khalwat yang menjadi rujukan dari penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara di sini dilakukan terhadap para pejabat berkompeten terhadap pelaksanaan penerapan Qanun No. 14 tahun 2003 seperti kepala Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Ketua Mahkamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data yaitu, deskriptif analisis dengan cara memaparkan semua permasalahan yang ada sehingga dapat diambil analisa kesimpulan yang dapat dijawab.

6. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan buku pedoman penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyelesaian proposal skripsi ini, maka penulis mengelompokkan penelitian ini kepada beberapa bab dan sub-sub, yaitu:

Bab I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan

Bab II, Tinjauan pustaka yang penulis mengungkapkan mengenai Letak Geografis Kota Subulussalam dan Kondisi Demografis Kota Subulussalam wilayah administrasi dan jumlah penduduk Kota Subulussalam dan gambaran umum lokasi penelitian, pengertian qanun, tindak pidana khlawat atau mesum, dasar pelaksanaan hukuman cambuk dan hukuman denda, proses pelaksanaan hukuman cambuk atau hukuman denda.

Bab III, Peranan Instansi Terkait Qanun No. 14 tahun 2003 dalam mencegah pergaulan bebas, meliputi Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah.

Bab IV, Implementasi Qanun No. 14 tahun 2003 di Kota Subulussalam dalam mencegah pergaulan bebas, yang meliputi Efektivitas Qanun dalam mencegah pergaulan bebas (khalwat), faktor-faktor pendukung, faktor penghambat.

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI TENTANG KOTA SUBULUSSALAM**

#### **A. Letak Geografis Kota Subulussalam**

Kota Subulussalam adalah sebuah Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Subulussalam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah Kota di Provinsi Aceh yang termuda ( Si Anak Bungsu ), merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Secara geografis letak Kota Subulussalam berbatasan langsung :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten PakPak Barat dan Kabupaten Dairi”

Pada saat itu Pusat Pemerintahan Kota Subulussalam berada di Kecamatan Simpang Kiri tepatnya di kantor WaliKota yang digunakan sementara merupakan bangunan bekas kantor Camat Simpang Kiri.

## B. Kondisi Demografis Kota Subulussalam

TABEL I

Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Subulussalam

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas(Km)	Jumlah Penduduk
		Desa	Kemukiman		
1	Simpang Kiri	14	2	213	30,133
2	Penanggalan	10	1	93	12,544
3	Rundeng	23	2	332	12,015
4	Sultan Daulat	17	2	602	14,164
5	Longkib	10	1	151	4,852
	Jumlah	74	8	1,391	73,708

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2016.

Berdasarkan Data diatas Kecamatan Sultan Daulat merupakan Kecamatan terluas, meliputi 43,28% dari total Luas Kota Subulussalam, diikuti Kecamatan Rundeng, meliputi 23,88%, Kecamatan Simpang Kiri 15,31%,Kecamatan Longkib 10,85% dan Penanggalan 6,68%.

Kota Subulussalam adalah salah satu dari 5 (lima) Kota yang terdapat di Provinsi Aceh, letak disepanjang hamparan Bukit Barisan menjadikan Kota Subulussalam sebagai kota yang mempunyai panorama alam yang sangat indah. Kota Subulussalam mempunyai penduduk dari berbagai latar belakang etnis diantaranya Etnis Singkil (Boang), Etnis Batak (Pakpak), Etnis

Aceh, Etnis Alas, Minang dan Jawa menjadikan Kota ini sebagai Kota yang multi Etnis.<sup>15</sup>

Dalam komunikasi sehari-hari Penduduk Kota Subulussalam menggunakan Bahasa Daerah yaitu Bahasa Boang dan Bahasa Pakpak. Kota Subulussalam memiliki luas Daerah lebih kurang 1.391 km dan jumlah Penduduk 73.708 jiwa yang mendiami 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Longkip, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Runding, Kecamatan Simpang Kiri, dan Kecamatan Sultan Daulat.

Meskipun Kota Subulussalam masih baru, Kota Subulussalam mempunyai Potensi-Potensi alam yang cukup banyak yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Potensi Wisata misalnya dan Sumber Daya Alam besar lainnya bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi Pendapatan Daerah (PAD) bila dikelola dengan sumber daya manusia yang memadai dan juga tidak terlepas dari Komoditi unggulan Kota Subulussalam yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya

---

<sup>15</sup>. Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, tahun 2016.



adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, dan Kopi.

## 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap Anak Bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar.

Perlu untuk dipahami bahwa masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama.

Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Kota Subulussalam dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana

prasarana pembangunan untuk kepentingan Pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan.

Sektor Pendidikan di Kota Subulussalam dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dan lebih maju kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajarpun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1 mengenai jumlah sekolah yang tersedia di Kota Subulussalam yaitu, sebagaimana tertera dibawah ini :

TABEL II  
Jumlah Sekolah di Kota Subulussalam

No	Nama Kecamatan	Sekolah TK	Sekolah SD	Sekolah SMP	Sekolah SMA
1	Longkib	5 buah	10 buah	2 buah	2 buah
2	Simpang Kiri	8 buah	13 buah	5 buah	3 buah
3	Penanggalan	7 buah	7 buah	3 uah	2 buah
4	Sultan Daulat	6 buah	9 buah	3 buah	2 buah
5	Runding	6 buah	7 buah	7 buah	2 buah
Jumlah		32	46	20	11

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam. 2016.

Tabel di atas, hanya menyebutkan tingkatan sekolah umum yang ada di Kota Subulussalam. Belum lagi dimasukkan berapa jumlah pesantren yang ada di Kota Subulussalam juga perguruan tinggi. Selain itu, dengan banyaknya pembangunan rumah sekolah, maka menjadi besar manfaatnya untuk meminimalisir anak-anak terlantar di Kota Subulussalam.

## 2. Agama

Mengenai perkembangan Agama Islam di Kota Subulussalam tersebut lumayan bagus, dapat dilihat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti shalat berjamaah, ceramah agama, dan bentuk pengajian lainnya yang diadakan seperti pengajian setiap malam Jum'at, kegiatan ini dilaksanakan di Masjid dan Surau, bahkan ada yang di Pesantren.

Disamping itu, masyarakat Kota Subulussalam selalu aktif mengadakan upacara-upacara peringatan Hari Besar Islam, seperti menyambut tahun baru Islam, menyambut datangnya bulan ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperingati Isra'mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, serta kegiatan keagamaan lainnya.

### 3. Adat Istiadat

Perkembangan suatu Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar Hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar utama adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketenteraman”.<sup>16</sup>

Sebagai suatu Bangsa yang dihuni berbagai etnis dan golongan, Indonesia masih memakai Hukum adat sebagai salah satu sumber Hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok selalu melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya, interaksi sosial lainnya juga senantiasa didasari oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>. Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 485.

<sup>17</sup>. Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Media Group, 2008), h. 3.

Mengenai adat istiadat masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya adalah manifestasi dari Hukum Islam sendiri, khususnya bagi masyarakat suku Aceh yang 100% memeluk agama Islam. Umpamanya disaat ada kematian salah seorang anggota masyarakat, maka mayoritas masyarakat Kota Subulussalam melayat kerumah duka berta'ziah serta memberikan sadaqah seikhlas hati (bentuk uang, beras dan lain sebagainya), untuk meringankan beban keluarga si mayat.

#### 4. Mata Pencarian Penduduk

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk Kota Subulussalam yaitu sebanyak 73.708 jiwa. Terdiri dari 38.854 dengan jenis kelamin perempuan dan 34.854 dengan jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan dari perkembangan penduduk, maka Kota Subulussalam merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya kalau dibandingkan dengan 4 kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

---

Masyarakat Kota Subulussalam memiliki mata pencarian berbeda-beda, secara garis besar ada dua mata pencaharian yaitu: pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Dagang; kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, supir, tukang jahit, petani dan nelayan”.<sup>18</sup>

TABEL III

Keberadaan Masyarakat Kota Subulusalam, Aceh

No	Mata Pencarian	Jumlah	%
1	Petani	2.231	34,70
2	Buruh Perkebunan	1.783	6,42
3	Peternak	183	1,33
4	Nelayan	250	0,45
5	Pengrajinan	361	1,66
6	PNS	1.129	17,88
7	Pedagang	1360	7,80
8	Lainnya	25	29,65
	Jumlah	7322	100%

Badan Pusat Statistik/BPS Kota Subulussalam, tahun 2016.

Melihat uraian tabel di atas, ternyata mata pencarian masyarakat Kota Subulussalam lebih banyak bekerja sebagai petani, baik kepunyaan sendiri maupun kebun milik orang lain, sedangkan pekerjaan sebagai peternak pegawai dan pekerjaan lainnya hanyalah merupakan sangat relative sedikit

jumlahnya. Dengan demikian pekerjaan rata-rata masyarakat adalah sebagai petani, PNS serta berdagang.

### C. Pengertian Qanun

Dalam tataran hukum Indonesia, qanun berada pada urutan yang paling bawah sejajar dengan peraturan daerah, demikian juga dengan tataran hukum Islam.

Zainuddin Ali dengan mengutip Ahmad Rofiq megemukakan bahwa Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>19</sup> Hukum Islam memiliki ciri-ciri antara lain, bagian dan bersumber dari ajaran Islam, hukum yang mempunyai hubungan yang erat dan tidak dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Hukum Islam memiliki istilah kunci yaitu syari'ah dan fiqih. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis dan mendahulukan kewajiban dari hak. Secara umum Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum *taflifi* dan hukum *wadh'i*.

---

<sup>19</sup>. Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , h. 3.

Hukum taklifi adalah Al-Ahkam al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram. Sedangkan hukum wadh'i berarti hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan yang terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>20</sup>

Berbeda dengan hukum positif yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dalam masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain, tujuan hukum Islam adalah kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan yang bernilai tinggi dan abadi ini tidak menjadi perhatian dalam aturan-aturan hukum positif. Persepsi dan konsepsinya semata-mata menekankan pada sisi kehidupan masyarakat, sementara aturan yang berkaitan dengan sisi kehidupan individu tidak dinamakan hukum melainkan norma budi pekerti atau susila. Sebaliknya Islam sebagai agama wahyu dari Allah yang berdimensi *rahmatan li al'alam* memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani

---

<sup>20</sup>. *Ibid.* h. 8.



dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.<sup>21</sup>

Selanjutnya istilah qanun yang berada pada tataran yang paling bawah dari sistem hukum Indonesia sudah sejak lama sekali digunakan dalam literatur maupun dalam tafsiran. Bahkan dalam naskah bahasa melayu tulisan Jawi (Arab) digunakan istilah qanun sebagai judul buku, seperti “Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda” yang ditulis pada 1310 H/1890 H. Dari bacaan sepintas bahan tersebut menunjukkan istilah qanun dalam literature Barat dikaitkan kepada hukum Kristen, sebaliknya dalam literature tulisan Jawi di Indonesiadikaitkan kepada hukum Islam.<sup>22</sup>

Dengan demikian dari uraian di atas dapat diberi arti bahwa yang dimaksud dengan qanun adalah kaidah yang bersumber dari hukum Kristen. Pangkaian qanun kepada agama menunjukkan pula bahwa qanun itu merupakan aturan hukum yang tidak terkait pada suatu wilayah Negara akan tetapi semata-mata dikaitkan kepada agama.

---

<sup>21</sup>. *Ibid*, h. 10.

<sup>22</sup>. T. Djunaidi, majalah Hukum: Qanun Arif dan Permasalahannya, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syeikh Kuala, 1994), hlm. 1.

#### D. Tindak Pidana Di Bidang Khalwat

Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khalat yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negative. Dalam makna positive, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negative, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.<sup>23</sup> Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna kedua. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah dalam agama Islam. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>23</sup>. Al Yasa' Abu Bakar, Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), h. 275.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>24</sup>

Khalwat ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan hukuman kafarah. Bentuk tindak pidana khalwat ini termasuk dalam katagori jarimah ta'zir yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atay berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi dan memungkinkan terjadinya khalwat/mesum. Menurut fiqih Syafi'iyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan dan menentukan kadarnya.<sup>25</sup>

Dalam al-Qur'an dan Sunnah perbuatan khalwat ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya. Jadi perbuatan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zir*. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelanggaran ini tentu

---

<sup>24</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 285.

<sup>25</sup>. Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, (Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006). h. 33.

harus dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat.

Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup ta'zir, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus.

Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut :

1. Al-Rukn al-Syar'i (unsur hukum), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.
2. Al-Rukn al-Madi (unsur material), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
3. Al-Rukn al-Adabi (unsur moral), yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.<sup>26</sup>

Sementara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Karena itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus yang telah disebutkan di atas, maka penentuan tentang perbuatan

---

<sup>26</sup>. *Ibid*, h. 135.

khalwat dalam ruang lingkup ini dapat dikatakan sudah terindikasikan dan tergolong ke dalam perbuatan maksiat/kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya bagi pelaku perbuatan maksiat.

Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah sanksinya adalah ta'zir. Oleh karena itu, perbuatan khalwat/mesum adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang oleh setiap tanpa membirkan setiap orang melakukannya pada setiap saat dan tempat.

Dasar lain pelanggaran dari perbuatan khalwat yang dikategorikan sebagai ta'zir adalah karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman (semacam Undang-Undang/qanun yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksiat atau minimal).

Larangan khalwat merupakan pencegahan bagi pelaku zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman khamar, dan maisir. Larangan zina justru di mulai dari tindakan-tindakan yang mengarah

kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Dalam pelaksanaan syariat Islam, masalah khalwat diatur dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pembentukan qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang menyangkut perbuatan zina, qanun yang mengatur tentang delik khalwat ini pada prinsipnya selain sebagai upaya *pemitif* dan *represif*, sekaligus juga sebagai upaya *preventif* agar kasus-kasus perzinahan tidak berkembang di wilayah Aceh. Dalam istilah hukum Islam, upaya *preventif* seperti ini disebut dengan *saad al-dzari'ah* (menutup jalan). Yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinahan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan

hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>27</sup>

Dalam qanun yang mengatur tentang pelarangan khalwat, ruang lingkup pelarangaannya adalah segala bentuk kegiatan , perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan pelarangan khalwat sebagaimana terdapat pada pasal 3 :

1. Menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran seta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>28</sup>

Perbuatan yang dimaksud dapat merusak kehormatan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarga pelaku.

Adapun ketentuan-ketentuan materil tentang larangan khalwat tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4 : Khalwat/mesum hukumnya haram.

Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

pasal6: Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan khalwat atau mesum.

---

<sup>27</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 350.

<sup>28</sup> .himpunan undang, Keputusan Presiden, Praturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), h. 289.

Pasal 7: Setiap orang baik sendiri atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat atau mesum.

Ancaman hukuman terhadap pelanggaran qanun ini adalah sebagai

berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan *'uqubat* cambuk paling banyak 9 (Sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan *'uqubatta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah jarimah *ta'zir*.<sup>29</sup>

Dalam qanun ini juga mengatur tentang pengulangan terhadap

pelanggaran qanun ini, yaitu terdapat dalam Pasal 24 yang isinya bahwa

pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 hukumnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *'uqubat* maksimal.

Pasal 25 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dan Pasal 6.

1. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqubat*nyadijatuhkannya pada penanggung jawab.
2. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

---

<sup>29</sup>. Ibid, h. 294.



ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan *'uqubat* administrative dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Denda hanya dibebankan pada penanggung jawab orang yang bersangkutan, jika memberikan fasilitas ataupun melindungi orang yang melakukan khalwat. Sedangkan dalam hal khalwat tersebut dilakukan oleh orang yang bekerja pada badan usaha atau badan hukum dia bekerja, maka cambuk hanya dikenakan pada orang yang bersangkutan dan jika kegiatan khalwat tersebut untuk menunjang kegiatan usahanya baru dan sanksinya administrative diberlakukan.

Adapun unsur-unsur khusus yang terdapat pada *jarimah* khalwat adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersunyi-sunyi.
- b. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim.
- c. Ada *'i'tikad jahat*.<sup>30</sup>

Bersunyi-sunyi masih ditetapkan sebagai unsur sifat khalwat di mana dalam hal ini masih mengikuti kitab-kitab fiqh. Dalam beberapa hal, definisi ini memang kontradiktif dengan kenyataan, sebab secara tekstual,

---

<sup>30</sup>. Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 274.

defenisi tersebut tidak menjerat nuansa khalwat yang kadang dilakukan secara terang-terangan yang disebut dengan pergaulan bebas. Praktik-praktik yang berbentuk pergaulan bebas ini banyak terlihat dalam keseharian.

Yang diharapkan dari penekanan terhadap sifat bersunyi-sunyi adalah dampaknya secara psikologis kepada masyarakat. Sesuai dengan ayat tentang larangan zina. Perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, karena itu khalwat adalah jalan ke arah perzinahan.

Adapun unsur i'tikad, memang dalam khalwat unsur itu sangat kentara. Para pelaku pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu tetap dilakukan, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untu menghalalkan hubungan suami istri, akan tetapi lembaga ini tidak digunakan.

## **E. Dasar Pelaksanaan Hukuman Cambuk dan Hukuman Denda**

### **1. Dasar Hukuman Cambuk**

Syariat Islam adalah satuan hukum modern dan merupakan salah satu system hukum yang berlaku, substansiny mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah, hukum keluarga, muamalah, ekonomi, politik dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum pidana dalam Islam terdapat empat macam hukuman, yaitu *hudud*, *qishah-diyat*, *kifarat* dan *ta'zir*. Tindak pidana yang termasuk dalam jenis hukuman *hudud* adalah terdiri dan zina, qadzab, khamar, pencurian, hirabah, *murtad* dan *bughat* (pemberontak).

Zina hukumanya dera 100 kali, pengasingan dan rajam. *Qadzab* hukumannya dera 80 kali. Khamar hukumannya dera 80 kali. Pencurian hukumannya potong tangan. Hirabah hukumanya mati, mati dengan disalib, potong tangan dan kaki dan pengasingan. Murtad hukumannya mati, sedangkan bughdad hukumanya juga. Tindak pidana yang termasuk dalam jenis hukuman qishas-diyat idalah terdiri dari pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kesalahan, penganiayaan dan luka-luka kesalahan.<sup>31</sup>

Pembunuhan sengaja hukumannya mati dan dapat dimaafkan dengan diyat. Pembunuhan menyerupai sengaja hukumannya diyat. Pembunuhan

---

<sup>31</sup>. Muchsin, Misri A. *et. al*, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. 2, 2008).

kesalahan hukumannya dengan diyat. Penganiayaan hukumannya dengan pembalasan setimpal. Sedangkan luka-luka kesalahan hukumannya dengan diyat atau dapat dimaafkan.

Tindak pidana yang termasuk dalam jenis hukuman kifarat adalah terdiri dari pembunuhan menyerupai sengaja, perusakan puasa, perusakan ihram, melanggar sumpah, menggauli istri saat datang bulan dan menggauli istri setelah menziharnya.<sup>32</sup> Hukuman semua tindak pidana kifarat berupa membebaskan hamba, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika juga tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin.

Tindak pidana yang termasuk dalam jenis hukuman *ta'zir* adalah semua tindak pidana yang tidak disebutkan dalam *hudud*, *qishas-diyat* dan *kifarat*. Hukumannya terdiri diri mati, dera (jilid, cambuk), kurungan, pengasingan, salib, pengucilan, ancaman (teguran) dan denda.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh adalah berdasarkan Qanun Provinsi Aceh yang merupakan *ra'yu* (produk pemikiran manusia) dari apa yang digariskan Tuhan di dalam al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Qanun lahir akibat kebijakan negara. Kebijakan negara dimaksudkan disini

---

<sup>32</sup>. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Puasa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 367.

adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Pembentukan qanun-qanun Provinsi Aceh tentang hukuman cambuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan Qanun menjadi lebih kuat karena memiliki payung hukum. Pelaksanaan hukum cambuk bagi pelaku tindak pidana baru diatur dalam beberapa masalah hukum saja di Provinsi Aceh yaitu tentang *maisir* (judi), minuman khamar dan sejenisnya dan perkara khalwat/mesum.

Melalui qanun-qanun Provinsi Aceh yang telah dikeluarkan tersebut, dimana sanksi hukumnya antara lain pencambukan terhadap terdakwa. Selain daripada itu adanya hukuman denda yang merupakan subsidair tidaklah dapat menggantikan secara mutlak dan menyeluruh pada sanksi cambuk yang merupakan hukuman pokok dalam sistem sanksi yang diatur dalam Qanun.

Hukuman cambuk bagi pelaku khalwat ditetapkan ditetapkan dalam qanun Provinsi Aceh No. Tahun 2003 Tentang khalwat/mesum Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang bersembunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6, diancam dengan uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).<sup>33</sup>

Menurut qanun ini tujuan larangan khalwat/mesum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat atau mesum.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

---

<sup>33</sup> . Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur ; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, h. 293.

Hukuman cambuk yang telah diatur di dalam Qanun Aceh tersebut merupakan suatu aturan yang cukup esensial dalam rangka membentuk tatanan masyarakat yang ideal dan tertib.

## 2. Dasar Hukuman Denda

Denda merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa akibat perbuatan khalwat/mesum yang dilakukannya setelah mendapat keputusan Mahkamah Syar'iyah yang berkuatan hukum tetap. Apabila suatu keputusan Mahkamah Syar'iyah belum memiliki kekuatan tetap karena terdakwa atau jaksa melakukan banding atau kasasi, maka keputusan tentang kewajiban membayar denda belum pasti dilaksanakan.

Besaran denda yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan (3) sebagai berikut

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan, dan atau denda

paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 6 tersebut adalah setiap orang atau sekelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan perbuatan khalwat/mesum.

Dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) atas menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat bersifat alternatif (pilihan) atau kumulatif (gabungan antara cambuk dan hukuman denda sekaligus). Sementara itu setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha yang memberikan fasilitas untuk perbuatan khalwat dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Bagi mereka yang mengulangi kembali perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu sepertiga dari hukuman maksimal yang ditentukan dalam Pasal 22.

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, sekiranya pelanggaran tersebut di atas dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya, dan apabila ada hubungan dengan izin usaha yang

---

<sup>34</sup>. *Ibid*, h. 293.



diprolehnya, maka izin usaha tersebut dapat dicabut sebagai hukuman administratif atas badan usaha tersebut.<sup>35</sup>

## **F. Proses Cara Pelaksanaan Pidana Cambuk**

### **1. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Cambuk**

Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun dan atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil. Pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai hukm tetap. Penundaan pelaksanaan uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.<sup>36</sup>

Tata cara pelaksanaan hukuman badan (uqubat) itu, dilakukan oleh pecambuk (algojo) dari jajaran petugas Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) yang ditunjuk oleh Jaksa selaku pihak eksekutor ke arah panggung terhukum

---

<sup>35</sup>. Abu Bakar, Syariat Islam Paradigma Kebijakan, h. 283.

<sup>36</sup>. Dinas Syari'at Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), h, 8

sesuai dengan jumlah hukumannya. Sang algojo melakukan tugasnya dengan mengenakan jubah berwarna hijau yang menutupi kepalanya, sedangkan para terhukum memakai jubah tipis berwarna putih. Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri jaksa dan dokter. Tempat pencambukan di atas alas berukuran minimal 3 x 3 meter.<sup>37</sup>

Terhukum dicambuk dalam keadaan berdiri (karena laki-laki), bila terhukumnya perempuan harus dalam posisi duduk. Posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak pecambuk dengan terhukum 0,75-1 meter dengan wilayah pecambuk di panggung (bahu sesuai pinggul). Hukuman dilaksanakan di atas panggung, dan panggung bisa menyaksikan langsung dari jarak sepuluh meter. Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri jaksa dan dokter.<sup>38</sup>

Alat yang digunakan berupa sepotong rotan sepanjang satu meter dengan diameter antara 0,75 sentimeter sampai satu sentimeter, dengan sudut anchang-ancang kurang lebih empat puluh derajat. Sebelum dilakukan

---

<sup>37</sup>. Zainuddin, Muslim *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), h. 54.

<sup>38</sup>. *Ibid*, h. 59.

pencambukan siterpidana secara medis harus dinyatakan sehat oleh dokter, bila terjadi masalah kesehatan pencambukan harus segera mendapat penanganan dari tim medis yang telah dipersiapkan.

Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk terdapat pada Pasal 28

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk.
2. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (1) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
3. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
4. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
5. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri terdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
6. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
7. Apabila selamaa pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.<sup>39</sup>

Prof al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya sekilas syariat Islam di Aceh

memperinci lebih jauh bahwa :

---

<sup>39</sup>. Muchsin, Misri A. *et. al*, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. 2, 2008).

- a) Terhukum harus dalam kondisi sehat (dapat menjalani hukuman cambuk).
- b) Pencambuk adalah petugas yang sudah dilatih, yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum.
- c) Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0,75 s/d 1 cm.
- d) Jarak pecambuk dengan terhukum minimal 70 cm.
- e) Jarak pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 cm.
- f) Pencambukan akan dihentikan sementara kalau menyebabkan luka atau diminta oleh dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri.
- g) Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau dapat ditangkap.
- h) Terhukum diberi berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman.<sup>40</sup>

## 2. Proses Pelaksanaan Hukuman Denda

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku khalwat/mesum ada kemungkinan hakim memutuskan hukuman secara alternatif atau secara kumulatif, memilih salah satu hukuman antara cambuk dan denda atau hukuman cambuknya saja atau hanya hukuman denda.

---

<sup>40</sup>. Al –Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, kebijakan dan kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), H. 231.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku khalwat/mesum, baik alternatif maupun kumulatif didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa dan dengan keyakinan hakim sesuai wewenang yang dimilikinya.

Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum Pasal 23 menentukan bahwa denda seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor secara langsung ke kas Baitul Mall. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 23 Qanun Nomor 23 Tahun 2003 ditetapkan selama Baitul Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke kas Daerah.

Berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 di atas, dapat dipahami bahwa terhukum setelah memperoleh keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam arti hukuman yang dijatuhkan hakim telah diterima tanpa melakukan upaya banding atau kasasi, harus melakukan penyetoran denda ke Baitul Mal setempat dan melaporkan kepada Jaksa sebagai eksekutor.

### BAB III

## PERAN INSTANSI TERKAIT QANUN NO, 14 TAHUN 2003 DALAM MENCEGAH PERGAULAN BEBAS

### A. Dinas Syariat Islam

Di antara faktor yang menentukan suksesnya pelaksanaan Syariat Islam adalah adanya lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Salah satu lembaga tersebut adalah Dinas Syariat Islam. Lembaga yang ikut bertanggungjawab terhadap sukses tidaknya pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 38 tugas pokok Dinas Syariat Islam Aceh Subulussalam adalah melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah Kota Subulussalam dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.<sup>41</sup> Dinas Syariat Islam mempunyai Fungsi dan wewenang yang cukup luas yaitu dengan visi dan misinya mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang adil, sejahtera dan bermartabat sebagai hasil pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.

---

<sup>41</sup> .Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), h. 84.

Menurut M. Shaleh Suhaidy agar visi dan misi Dinas Syariat Islam berhasil dengan baik, maka ia harus mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan, baik itu program umum maupun program khusus dan program prioritas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.<sup>42</sup> Meskipun qanun Provinsi Aceh telah menentukan bahwa pelaku khalwat/mesum dapat dicambuk atau denda, namun dalam proses penyelesaian kasus khalwat/mesum tidak selamanya sampai ke tingkat pencambukan atau denda sebagaimana ketentuan tersebut. Tingkatan proses yang dilakukan adalah :

1. Memberikan nasehat dalam kerangka pembinaan di tempat kejadian.
2. Memanggil orang tua dan tokoh kampong dengan membuat surat perjanjian.
3. Memproses sesuai ketentuan qanun.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>. M. Shaleh Suhaidy, Tentang Dinas Syariat Islam: Apa dan Untuk Apa?, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2002), h. 269

<sup>43</sup>. Sanusi, Kepala Dinas Syariat Islam kota Subulussalam, wawancara pribadi, Kota Subulussalam tanggal 2 Agustus 2017 jam 08.30 sampai dengan selesai

## B. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran Qanun yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan pengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peingatan/nasehat dan bimbingan terhadap pelaku.

Tentang tugas pokok Wilayatul Hisbah dijelaskan dalam pasal 4 keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wilayatul Hisbah adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan Perundangan-undangan dibidang Syariat Islam.
  - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap, sebab orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
  - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan segera memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat dan mengirimkan tarunannya kepada Kepada Kampung dan keluarga pelaku.
  - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik.<sup>44</sup>
- Melakukan tugas, dalam kerangka *amar ma'ruf nahi mungkar*.

---

<sup>44</sup>. Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Praturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), h. 396..



Pasal 5 ayat (1, dan 2) disebutkan bahwa kewenangan Wilayatul

Hisbah adalah:

1. Petugas Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
2. Petuagas Wilayatul Hisbah berwenang menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa

kewenangan Muhtasib Wilayatul Hisbah adalah:

1. Menerima pengadilan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
3. Meminta keterangan identitas seseorang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran ketentuan Syariat islam.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.<sup>45</sup>

Di lihat dari fungsi dan wewenang yang dimiliki sebenarnya

Wilayatul Hisbah dapat berperan signifikan dalam upaya menegakkan Syariat

Islam terutama yang berkaitan dengan khalwat/mesum. Tetapi dalam

kenyataannya fungsi dan wewenang itu terbentur dengan berbagai kendala,

diantara dana operasional dan sulitnya melakukannya koordinasi. Menurut

---

<sup>45</sup>. *Ibid.* 12

Kepala Wilayatul Hisbah persoalan yang dihadapi Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional Wilayatul Hisbah, sehingga sangat membatasi kegiatan patrol dan penindakan terhadap laporan masyarakat ketika terjadi kasus khalwat/mesum.<sup>46</sup>

### **C. Mahkamah Syar'iyah**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Aceh dengan jelas menetapkan kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagai dari sistem Peradilan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 128 sampai dengan pasal 137 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Ayat

(1) ditentukan:

- (1). Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

---

<sup>46</sup>. Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.

(2). Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dari dan berada di Aceh.<sup>47</sup>

Dalam penjelasan ayat (2) tersebut di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud orang yang beragama Islam dalam ketentuan ini adalah siapapun yang beragama Islam tanpa membedakan Kewarganegaraan, kedudukan dan status.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah provinsi Aceh.

## 2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu dalam pasal 128 Ayat (3) dan (4) yang menentukan :

1. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi perkara bidang al-syakhsiah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas syariat Islam.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah

---

<sup>47</sup>. Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, h. 163.

(hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pada Qanun Aceh.<sup>48</sup>

#### D. Kejaksaan Negeri

Keberadaan kejaksaan Negeri Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu sub dari sistem hukum. Marwan Efendi menyatakan, sebagian suatu sub sistem yang berada dalam suatu kesatuan yang diatur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan tugas kejaksaan dalam perannya sebagai institusi pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 208 ditentukan oleh :

1. Kejaksaan di Aceh merupakan bagian-bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syariat Islam.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>. *Ibid*, h. 40.

<sup>49</sup>. Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Kedudukan dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 101.

<sup>50</sup>. Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), h. 340.

Di dalam operasional pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh lebih lanjut diaplikasikan dalam Keputusan Bersama antara Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Aceh masing-masing Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor B-1229/N.I/08/2004, Nomor MSY.P/K/HK.009/614/2994, Nomor WI.DI.UM.01.1116 dan Nomor, WI.UM.01.08.1604 tentang Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tanggal 9 Agustus 2004, yang dalam Pasal 1 menentukan :

- a. Kepolisian Daerah Provinsi Aceh mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Aceh untuk melakukan penyidikan perkara pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh dan menerima hasil penyidikan dari PPNS yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan atau Mahkamah Syar'iyah.
- b. Kepolisian Daerah Aceh membantu melakukan penyelidikan terhadap perkara pelanggaran qanun-qanun Provinsi Aceh  
Dari ketentuan Keputusan Bersama tersebut di atas memberikan

gambaran bahwa Kejaksaan Negeri memiliki wewenang menerima berkas perkara dari penyidik, dalam hal ini pihak Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk selanjutnya menyerahkan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Kejaksaan juga sangat berperan dalam proses pelaksanaan *'uqubat* sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan *'Uqubat* Cambuk dalam Pasal 2 menentukan :

- a. Pelaksanaan *'uqubat* cambuk adalah kewenangan dan tanggungjawab jaksa.
- b. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab tersebut pada ayat (1) Jaksa menunjuk pencambuk.

Di lihat dari konteks pelaksanaan Syariat islam sebenarnya posisi jaksa adalah pasif dalam artian lembaga Kejaksanaan baru dapat berperan jika ada perlimpahan berkas baik dari pihak Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>. *Ibid*, h. 345

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI QANUN NO. 14 TAHUN 2003**

#### **DALAM MENCEGAH PERGAULAN**

##### **A. Implementasi Qanun Dalam Mencegah Khalwat/Mesum**

Pada dasarnya setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri.

Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk undang-undang, konvensi, peraturan daerah (qanun), adat dan sebagainya. Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Qanun Provinsi Aceh tentang khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tetapi sejauhmana peran Qanun ini dalam mencegah khalwat tetap menyisakan banyak pertanyaan. Menurut Rasyiduddin, meskipun telah ada Qanun yang

berfungsi mencegah terjadinya khalwat/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku khalwat/mesum kian merajalela seperti yang kita saksikan sekarang ini.<sup>52</sup>

Selanjutnya bahwa pelaksanaan qanun-qanun syariat Islam di Aceh, Kota Subulussalam sangatlah memperhatikan karena sepertinya tidak ada upaya apapun dari pejabat atau dinas terkait dalam mengimplementasikannya banya bertebaran saat ini adalah spanduk-spanduk himbauan yang jelas-jelas daya dobraknya kurang sekali karena hanya bersifat himbauan.

Pandangan-pandangan belum efektifnya tujuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 ini didasarkan pada kenyataan bahwa semakin lama kasus-kasus khalwat/mesum semakin bertambah, sementara proses pengusutannya banyak yang berhenti di tengah jalan. Antara tahun 2015 sampai dengan 2017 pada saat ini terjadi hanya 10 kasus. Untuk lebih lanjut jelasnya kasus tersebut dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

---

<sup>52</sup>. H. Qaharuddin Kombih, Ketua MPU Kota Subulussalam, wawancara pribadi , Subulussalam tanggal 8 Agustus, pukul 09.20 sampai dengan selesai



Tabel IV  
Pelanggaran Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di  
Kota Subulussalam

No	Nama	Alamat	Tanggal	Keterangan
1	Dian dengan Irfan	Desa Cepu/Desa Cepu	24-01-2015	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
2	Jailani dengan Irma Yana	Desa Penanggalan/Desa Penanggalan	08-03-2015	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
3	Hamdani dengan Fitri	Desa Subulussalam/Desa Cepu	20-04-2015	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
4	M. Yusuf dengan Ayu	Desa K. Baru/Desa Gunung Lagan	29-07-2015	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
5	M. Jamin Dengan Irmawati	Desa blok IV/Desa Tangga Besi	05-10-2015	Diproses sampai ke Mahkamah Syar'iyah
6	Iyar dengan Nurbaiti	Desa Selo Jampak/Desa Belukur	28-12-2015	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
7	Jamal dengan Intan	Desa Suka Makmur/Desa Lipat Kajang	02-03-2016	Diproses sampai ke Mahkamah Syar'iyah
8	Fatha dengan Susilawati	Desa Suka Makmur/Desa Indah Cepu	06-05-2016	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
9	Rahmad dengan Indah Rahayu	Desa Kuala Kepeng/Desa Hrapan Baru	29-7-2016	Diserahkan kepada orang tua masing-masing
10	Zainul dengan Pipit Indah Lestari	Desa Longkib/Desa Sekelondang	18-09-2016	Diserahkan kepada orang tua masing-masing

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

Dari sepuluh kasus khalwat/mesum yang terjadi diantara tahun 2015 sampai pada tahun 2017, hanya dua kasus yang sampai ke Mahkamah Syar'iyah, kasus yang lainnya diselesaikan pada tataran Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, yaitu diserahkan kepada orang tua dan aparat desa masing-masing untuk memperoleh pembinaan.

## **B. Faktor-faktor yang Mendukung**

Keberadaan qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perbuatan yang merusak akal sehat. Di lihat dari konteks ini sebenarnya masyarakat sangat memberikan dorongan yang kuat agar pelaksanaan ini dapat berlaku secara efektif, sehingga secara umum warga masyarakat dapat terlindungi dari perilaku tercela, perbuatan yang merusak akal, apalagi masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat religius.

Berikut ini dikemukakan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong yang dapat menjadi pendukung di tegakkan qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.

### **1. Adanya Dasar Hukum Yang Kuat**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999

merupakan suatu langkah maju dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh.

Melalui Undang-Undang Provinsi Aceh dapat mengimpelentasikan keinginan yang sejak lama yang telah dipendam yaitu melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah*. Dari Undang-Undang ini kemudian melahirkan beberapa Qanun Aceh antara lain Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*, karena itu dari segi yuridis formal keberadaan Qanun tentang khalwat memiliki dasar hukum yang kuat.

Persoalan yang demikian muncul adalah mengapa Qanun tentang khalwat yang sudah memiliki dasar yang kuat ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif, idealnya sebuah Qanun dalam posisi seperti itu sudah dapat menjadi suatu ornament untuk merubah prilaku masyarakat kearah yang lebih baik, atau paling tidak frekuensi khalwat semakin berkurang. Seorang pengamat hukum mengatakan bahwa ketidakseriusan pemerintah daerah menjadi penyebab penting Qanun Nomor 14 Tahun 2001 tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian pada satu <sup>53</sup>sisi pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum,

---

<sup>53</sup>. Rifyak Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 51.

diharapkan dapat mengurangi kasus tentang khalwat/mesum, tetapi pada sisi lain bahwa suksesnya pelaksanaan Qanun juga tidak terlepas dari idealnya Qanun anggota masyarakat.

Sama dengan hukum positif lainnya, maka fungsi qanun adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku tercela anggota masyarakat lainnya. Lahirnya qanun tentang khalwat/mesum diharapkan akan tercipta kehidupan yang lebih baik dan teratur terutama yang berkaitan dengan pergaulan pra nikah anggota masyarakat yang terhindar dari pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan..

## 2. Kehidupan masyarakat Aceh yang Religius

Bahwa kehidupan masyarakat Aceh sangat religius sudah diakui oleh banyak pihak bahkan hasil penelitian menunjukkan agama Islam masuk ke Nusantara adalah melalui Aceh. Begitu kuatnya agama Islam dengan masyarakat sehingga setiap sisi adat Aceh selalu dipengaruhi oleh agama Islam.

Untuk memberikan gambaran bagaimana kuatnya hubungan antara masyarakat Aceh dengan Islam juga dapat dilihat dari setiap sisi kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari simbol-simbol Islam seperti penamaan

anak, penerimaan tamu, banyaknya lembaga-lembaga pengajian (pasantren),  
san sampai saat ini mayoritas masyarakat Aceh Beragama Islam.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari Islam. Demikian juga masyarakat Kota Subulussalam yang merupakan salah satu Provinsi dimana penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam.

### 3. Pembentukan Instansi Tekait

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Syari'at Islam, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki tugas pokok di bidang pelaksanaan Syari'at Islam.

Adapun instansi/lembaga-lembaga tersebut adalah:

#### a. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dimana dalam Pasal 36 ditentukan bahwa Dinas Syari'at mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam.

#### b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Lembaga Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah juga dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dalam Pasal 124 ayat (1) Qanun tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamaong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan kebijakan daerah dan Syari'at Islam, ketenteraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan

c. Mahkamah Syar'iyah

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, maka pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh yang presmiannya telah dilakukan oleh menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 4 maret 2003 bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H di Banda Aceh.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden dimaksud ditentukan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

### **C. Faktor-faktor yang Tidak Mendukung**

Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Provinsi Aceh Nomor Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum belumlah memiliki dampak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, dalam artian pada satu sisi masih banyak kasus khalwat/mesum di tengah-tengah masyarakat sementara itu pada sisi lain kasus-kasus khalwat/mesum yang terjadi di Kota Subulussalam tidak diselesaikan menurut ketentuan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum tersebut. Pada umumnya kasus khalwat/mesum sering diselesaikan secara adat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Subulussalam menyatakan bahwa pada umumnya warga masyarakat lebih menyukai agar kasus khalwat/mesum yang mereka lakukan diselesaikan secara adat, seperti membayar denda kepada masyarakat kampung setelah itu langsung melaksanakan pernikahan. Penyelesaian kasus secara adat ini lebih disukai karena lebih praktis dan tidak memakan biaya yang banyak dan

waktu yang terlalu lama.<sup>54</sup> Secara teoritis hambatan dalam menjalankan qanun khalwat ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Terkikisnya semangat melaksanakan Syariat Islam

Seperti telah dikemukakan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang segenap kehidupannya dijiwai oleh pengaruh agama Islam. Tetapi pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* telah lama hilang dari kehidupan mereka. Sebelum kedatangan Belanda hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum adat yang dijiwai oleh syariat Islam atau hukum adat yang sesuai dengan syariat Islam. Namun setelah Belanda menaklukkan Aceh (akhir abad ke 19 dan efektif pada awal ke 20) pelaksanaan hukum Islam mulai dibatasi bahkan dalam bidang perdagangan dan pidana dihapuskan secara tegas.

Kondisi seperti itu tentu membuat pemerintah Daerah dan masyarakat gamang dalam menyambut pelaksanaan syariat Islam, ada yang tidak peduli sama sekali dan sebahagian lain menyambutnya dengan penuh gembira.

Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh, sendiri seperti tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan syariat Islam

---

<sup>54</sup>. Abdul Malik, Ketua Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Kota Subulussalam tanggal 28 Agustus 2017.



termasuk pelaksanaan Qanun Nomor 14 tahun 2003, Ketua Mahkamah Syar'iyah menyebutkan bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Subulussalam berkeinginan sekali agar syariat Islam berjalan dengan efektif di Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Runding, tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi seperti dana membuat keinginan itu sulit terwujud secara utuh. Berkaitan dengan pendanaan dijelaskan, bukan saja untuk pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mengalami kendala, tetapi juga untuk kegiatan operasional petugas Wlayatul Hisbah dalam rangka mencegah terjadinya khalwat/mesum mengalami kesulitan.<sup>55</sup>

## 2. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Khalwat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negarak Kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.

---

<sup>55</sup>. Rasyidudin, Ketua Mahkamah Sya'iyah, Aceh Singkil, wawancara pribadi tanggal 29 Agustus 2017.

Sebagai negara hukum maka negara berkewajiban menjunjung hukum dan mewujudkan kepastian hukum tanpa terkecuali. Untuk mendukung kepastian hukum diatur pula tentang hak asasi warga Negara. Pemerintah memperuntukkan dan mengatur hak-hak warganya. Persoalan selanjutnya adalah ketika kasus-kasus khalwat/mesum hanya diselesaikan di kalangan masyarakat tanpa melalui proses hukum.

Masyarakat menyelesaikannya melalui adat, sebenarnya penyelesaian secara adat tidak menggugurkan hukum terhadap pelaku, namun karena ketika proses adat telah memutuskan misalnya terhadap pelaku yang diketahui berkhawat pelaku dinikahkan dan dianggap telah dihukum dengan menikah tersebut.

### 3. Kekuatan Qanun Tidak Signifikan

Kedudukan qanun dalam sistem hukum nasional tidak sekuat kedudukan undang-undang. Qanun dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 235 ayat (2) ditentukan, Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antara qanun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Qanun tentang khalwat/mesum sendiri pada dasarnya banyak sekali memiliki kelemahan yang mendasar untuk dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang kompleks. Hal ini antara lain menyangkut dengan masalah penahanan. Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah member perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Seterusnya dalam ketentuan Peralihan Pasal 31 dinyatakan sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun sendiri, maka hukum acara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam qanun. Ini berarti persoalan penahanan tidak diatur dalam qanun khalwat/mesum, maka menyangkut dengan penahanan harus merujuk ke Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Persoalan yang kemudian muncul adalah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tersangka baru dapat ditahan apabila ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukannya itu lima tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a yang berbunyi

:penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan ancaman hukuman dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 bahkan tidak sampai satu tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan dan kekuatan qanun khalwat/mesum dan keterbatasan wewenang yang dimiliki aparat penyidik merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan qanun khalwat/mesum di Kota Subulussalam sehingga banyak kasus-kasus khalwat/mesum terjadi yang penyelesaiannya secara adat di masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 sebenarnya memiliki beberapa faktor pendukung untuk mensukseskannya pelaksanaan qanun ini di lapangan, seperti memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adanya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
2. Disamping faktor pendukung, ternyata pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 juga menemui kendala yang menjadi hambatan dalam menjalankannya. Faktor-faktor tersebut adalah terkikisnya semangat pelaksanaan syariat Islam baik dari pemerintah Kota Subulussalam maupun dari masyarakat. Hal ini terpengaruh penjajahan yang begitu lama sehingga pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Faktor penghambat lainnya

adalah kepastian hukum terhadap pelaku khalwat, karena sering kali para pelaku khalwat dihakimi oleh masyarakat bukan oleh lembaga yang berkompeten dan yang terakhir yaitu kekuatan qanun khalwat tidak signifikan.

3. Keberadaan Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kecamatan Runding belum dilaksanakan secara efektif sehingga sulit untuk mencapai sasaran yang diharapkan yaitu menurunnya kasus-kasus khalwat/mesum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Padahal perilaku khalwat/mesum adalah jalan kepada perzinahan, sementara perzinahan itu sendiri merupakan perbuatan tercela dan penyakit kronis masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai dampak negative lainnya.

#### **B. Saran**

Agar pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 semakin efektif dalam kerangka pencegahan pergaulan bebas di Kecamatan Runding, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum seharusnya tidak ada eksklusifitas terhadap kelompok tertentu seperti yang terjadi di

Kecamatan Runding Kota Subulusalam, sehingga siapapun yang bersalah melakukan perbuatan khalwat/mesum dapat diproses sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian hukum akan semakin beribawa dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan aparat penegak hukum.

2. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegakan hukum untuk menerapkan peraturan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga keamanan, ketertiban dan keadilan dapat terwujud dengan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, wawancara pribadi, Kota Subulussalam 06 Juli 2017.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005*
- Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Ihyaut Turots, cetakan ketiga
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM)
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Burhan Ashofa, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008
- Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Darni, Tokoh Masyarakat, wawancara Pribadi, Kamis 6 Juli 2017
- Dinas Syari'at Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Nanggroe Aceh Darussalam, 2003
- Djunaidi, majalah Hukum: Qanun Arif dan Permasalahannya, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, 1994.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990



Himpunan undang-undang. Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur ; Berkaitan pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh ; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006

Muslim SH.I, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, senin 3 Juli 2017.

Marwan Efendi, *Kejaksanaan RI: Kedudukan dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005

M. Shaleh Suhaidy, Tentang Dinas Syariat Islam: Apa dsn Untuk Apa?, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Provinsi Aceh, 2002

Muchsin, Misri A. *et. al*, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. 2, 2008

Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Sya'fiyyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003*, Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006.

Ust. Usbar, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, selasa 4 Juli 2017

Tjoetra, Afrizal, Modul untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan, Aceh, ADF Banda Aceh. 2001

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, tahun 2016.

Rasyidudin, Ketua Mahkamah Sya'iyah, Aceh Singkil, wawancara pribadi tanggal 29 Agustus 2017.

Rifyak Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Khairul Bayan, 2004

Sanusi, Kepala Dinas Syariat Islam kota Subulussalam, wawancara pribadi, Kota Subulussalam tanggal 2 Agustus 2017 jam 08.30 sampai dengan selesai

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004

Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.

Qaharuddin Kombih, Ketua MPU Kota Subulussalam, wawancara pribadi , Subulussalam tanggal 8 Agustus, pukul 09.20 sampai dengan selesai

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zainuddin, Muslim *Problematisa Hukuman Cambuk Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

## DATA WAWANCARA

1. Sejauhmana Penerapan Qanun tentang Khalwat di Kota Subulussalam?
2. Apakah sebelumnya ada dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Wilayatul Hisbah (WH) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam?
3. Apakah sebelumnya juga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Wilayatul Hisbah (WH) ada mensosialisasikan bagaimana hukuman yang akan diberikan bagi sanksi yang melanggar Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam?
4. Apa saja menjadi faktor pendukung dalam penerapan Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam?
5. Apa saja menjadi faktor penghambat dalam penerapan Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam?

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Desa Runding tanggal 23 Desember 1993 putra dari pasangan suami istri Ayahanda (Alm) Zainuddin Lembong dan Ibunda Hj. Siti Amansyah Tinambunan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Di Runding Kecamatan Runding Kota Subulussalam pada tahun 2007, tingkat SLTP di SMP Darul Muta'alimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah pada tahun 2010, dan tingkat SLTA di MAS Darul Muta'alimin Tanah Merah pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan kuliah (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Medan Sumatra Utara mulai pada tahun 2013.